



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KOTA KEDIRI  
NOMOR : 188.4/2 /419.050/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pembentukan peraturan perundang-undangan Kota Kediri yang terencana terpadu dan sistimatis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 70);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Rapat Kerja Bapemperda bersama Tim Eksekutif Kota Kediri tanggal 14 Nopember 2024
  2. Surat Pj. Walikota Kediri tanggal 11 Desember 2024 Nomor : 100.3.2/1404/419.033/2024 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Desember 2024 mengenai Propemperda Kota Kediri Tahun 2025;
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri tanggal 7 Januari 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA DPRD KOTA KEDIRI,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KOTA KEDIRI  
 NOMOR : 188.4/ 2 /419.050/2025  
 TANGGAL : 7 Januari 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
 TAHUN 2025**

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAM- PAIAN (9)
				BAR U	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN		
1.	Perda Eksekutif	Penataan dan Pemberdayaa n Pedagang Kaki Lima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL</li> <li>- Aspek penataan PKL meliputi : Lokasi, waktu operasional, pendataan, dan perizinan.</li> <li>- Aspek Pemberdayaan PKL meliputi : pelatihan ketrampilan, sarana pemasaran, dan bantuan permodalan.</li> <li>- Hak, Kewajiban, dan Larangan</li> <li>- Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban PKL</li> <li>- Peran Serta Masyarakat</li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan PKL</li> <li>- Permendagri No 41 Tahun 2012</li> </ul>	✓		Disperdagin	Maret 2025
2.	Perda Eksekutif	Penyelenggara an Jalan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis dan klasifikasi jalan</li> <li>- Penetapan status jalan</li> <li>- Penataan dan</li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan</li> <li>- UU Nomor 2 Tahun 2022</li> </ul>	✓		DPUPR	Maret 2025

			<p>pengelolaan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dan badan usaha terkait penyelenggaraan jalan</li><li>- Perencanaan dan pembangunan jalan</li><li>- Pemeliharaan jalan;</li><li>- Penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan</li><li>- Penataan dan Pengawasan jalan</li><li>- Pembinaan Jalan Daerah</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>- PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan</li></ul>				
3.	Perda Eksekutif	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tujuan</li><li>- Penyediaan</li><li>- Pengelolaan</li><li>- Penyimpanan</li><li>- Distribusi</li><li>- Pengawasan cadangan pangan</li></ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</li><li>- PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</li></ul>	✓		DKPP	April 2025
4.	Perda Eksekutif	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis perizinan berusaha</li><li>- Sistem perizinan berusaha</li><li>- Proses dan tahapan penerbitan izin usaha</li><li>- Jenis-jenis izin usaha yang diperlukan</li><li>- Pengawasan perizinan</li></ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li><li>- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang</li></ul>	✓		DPMPSTP	April 2025

						Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko - PP Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha - Permen Investasi /Kepaqlq BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perizinan Berusaha Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha di Daerah				
5.	Perda Eksekutif	Penyelenggaraan Parkir Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelenggaraan Perparkiran oleh Pemerintah Daerah;</li><li>- Penyelenggaraan Perparkiran oleh Orang atau Badan;</li><li>- Rambu dan Marka Parkir;</li><li>- Tata Tertib Parkir;</li><li>- Pembangunan dan Pengembangan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;</li><li>- Penggunaan Sistem Informasi;</li><li>- Pembinaan dan</li></ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>- PP Nomor 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas Jalan</li><li>- Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir</li></ul>	✓		Dinas Perhubungan	Mei 2025

			Pengawasan;						
6.	Perda Eksekutif	Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampiran I struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan</li> <li>- Lampiran II struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan</li> <li>- Lampiran III struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum</li> <li>- Lampiran VI struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha atas jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 1 Tahun 2022</li> <li>- PP Nomor 35 Tahun 2023</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas LHKP</li> </ul>	Mei 2025	
7.	Perda Inisiatif	Penyelenggaraan Kota Cerdas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan Tata Kelola.</li> <li>- Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik.</li> <li>- Manajemen Inovasi.</li> <li>- Dimensi Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2009</li> <li>- PP Nomor 82 Tahun 2012</li> <li>- Perpres Nomor 95 Tahun 2018</li> </ul>	✓	Bapedda	Mei 2025	

8.	Perda Inisiatif	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kriteria cagar budaya</li><li>- Registrasi cagar budaya</li><li>- Pelestarian cagar budaya</li><li>- Pengelolaan cagar budaya</li><li>- Peran serta masyarakat</li></ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 11 Tahun 2010</li><li>- PP Nomor 1 Tahun 2022</li><li>- Permen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MK KP/2009</li><li>- Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021</li></ul>	✓		Disbudparpora	Mei 2025
9.	Perda Inisiatif	Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Upaya percepatan dan penguatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dilaksanakan dalam bentuk kebijakan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman serta pola pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>- UU nomor 1 tahun 2011 ttg perumahan dan kawasan pemukiman</li><li>- UU nomor 20 tahun 2011 ttg Rumah susun</li><li>- PP Nomor 14/2016 penyelenggaraan Perumahan dan kawasan pemukiman</li><li>- Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018</li></ul>	✓		Dinas Perkim	Mei 2025
10	Perda Inisiatif	Raperda Fasilitasi Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya Pokok menjamin kepastian Hukum atas produk makanan halal melalui persertifikatan dan</li></ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 33 Tahun 2014</li><li>- PP Nomor 39 Tahun 2021</li></ul>	✓		DPMPSTSP	Mei 2025

			Pengawasan makanan halal di Masyarakat perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing							
11	PERDA Eksekutif	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan Pendapatan daerah TA 2024</li><li>- Pelaksanaan Belanja daerah TA 2024</li><li>- Pelaksanaan Pembiayaan daerah TA 2024</li></ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>- PP 12 Tahun 2019</li><li>- Permendagri 77 Tahun 2020</li></ul>	✓	BPPKAD	Mei 2025	
12	PERDA Eksekutif	RPJMD Tahun 2025-2030	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perencanaan Pembangunan daerah</li></ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>- PP Nomor 8 Tahun 2008</li><li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017</li></ul>	✓	Bappeda	Juli 2025	
13	PERDA Eksekutif	Kawasan Tanpa Rokok	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat atau area tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok</li><li>- Persyaratan tempat khusus untuk merokok</li><li>- Larangan pada Kawasan Tanpa Rokok</li><li>- Peran serta Masyarakat</li></ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>- PP Nomor 28 Tahun 2024</li></ul>	✓	Dinas Kesehatan	Juli 2025	

			- Pembinaan dan pengawasan - sanksi						
14	PERDA Eksekutif	APBD Tahun Anggaran 2026	- Pendapatan daerah TA 2026 - Belanja daerah TA 2026 - Pembiayaan daerah TA 2026	✓		- PP 12 Tahun 2019 - Permendagri 77 Tahun 2020	✓	BPPKAD	Oktober 2025

KETUA DPRD KOTA KEDIRI,  
  
Dra. FIRDAUS  
